



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2023 ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dan stakeholder lainnya dalam kurun waktu Tahun 2023. Dengan kerja keras serta dukungan dari Instansi dan Komponen masyarakat Papua Barat diharapkan berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik. Namun, disadari bahwa tantangan dalam upaya P4GN cukup besar sehingga memerlukan kerja keras bersama.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan atas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan arahan agar semua yang kita usahakan dapat terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan.

Manokwari, 25 Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Papua Barat**



Anak Agung Made Sudana, S.H., S.I.K., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Hasil Evaluasi	4
C. Potensi dan Permasalahan	5
D. Dasar Hukum	7
BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	8
BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BNN	
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024	10
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Di Indonesia kejahatan narkoba sudah masuk kedalam kejahatan luar biasa atau juga disebut dengan *extra ordinary crime*. Dimana kejahatan narkoba yang jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara (*transnational crime*). Narkoba memiliki dampak yang buruk, mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter anak bangsa itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan dari sebelumnya 1,95 persen pada tahun 2022 menjadi 1,75 persen pada tahun 2023 atau 3.33 juta jiwa penduduk berusia 15 hingga 64 tahun.

Berdasarkan data laporan dari Bidang Pemberantasan BNNP Papua Barat, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Tidak Pidana Narkoba

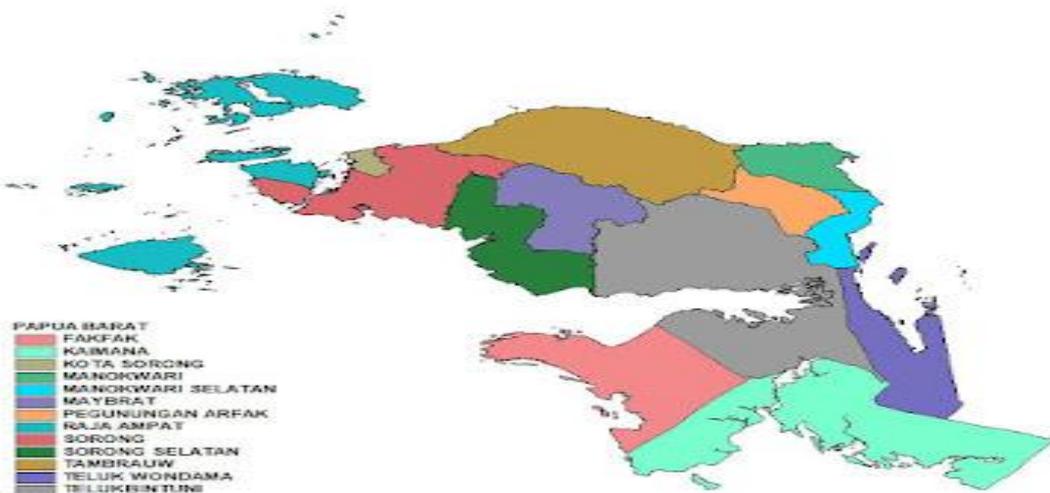
No	Tahun	Barang Bukti	Jumlah Tersangka
1	2021	Ganja : 11.612,78 gram	7 Orang
		Sabu : 9,9 gram	
2	2022	Ganja : 4.092,22 gram	8 Orang
		Sabu : 33,27 gram	
3	2023	Ganja : 123,233 gram	8 Orang
		Sabu : 10.304 gram	

Berdasarkan data diatas peredaran narkoba di Papua Barat dan Papua Barat Daya dari segi jumlah barang bukti menurun, hal ini bukan berarti bahwa kasus yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat semakin berkurang. Dengan kondisi geografis di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang begitu sulit dijangkau antar kabupaten/kota menjadi salah satu kendala yang sulit

dipecahkan, mengingat masih banyaknya tambang ilegal yang beroperasi menjadikan tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

BNNP Papua Barat berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja mencapai 99.398,26 km² terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong, dengan jumlah populasi 1.183.307 jiwa yang tersebar di 1.987 Desa/Kelurahan (sumber : *Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023*).

Faktor geografis Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berupa hutan, gunung dan jurang menjadi salah satu kendala yang sulit dipecahkan, mengingat keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil yang di setiap kabupaten dijadikan sebagai tempat transit oleh para bandar narkoba di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya;



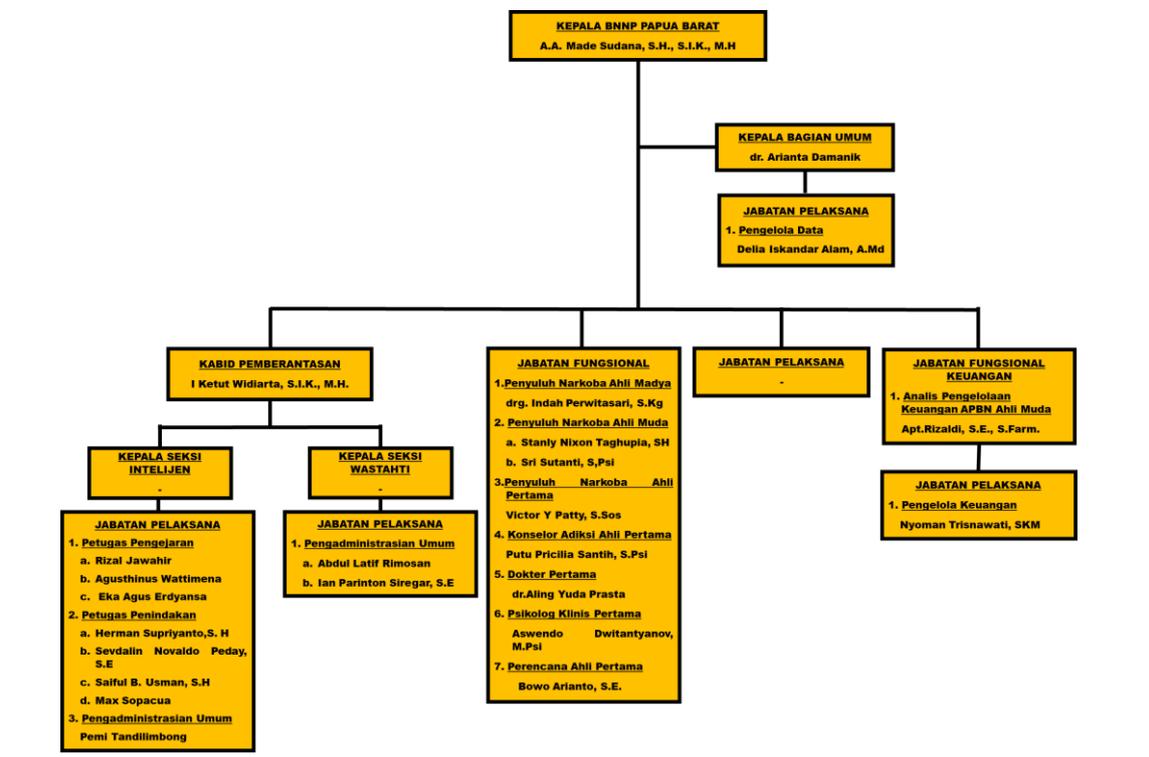
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, BNNP Papua Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi Papua Barat;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi Papua Barat;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi Papua Barat;
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi Papua Barat;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi Papua Barat;
6. Pelayanan administrasi BNNP Papua Barat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP Papua Barat.

Kewenangan BNNP Papua Barat secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta BNNP Papua Barat berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Personil BNNP Papua Barat berjumlah 47 personil dengan 12 PNS, 13 Polisi dan 22 PNPn dengan struktur organisasi menurut Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/175/II/KA/KP.07.00/2022/BNN Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagai berikut :



B. HASIL EVALUASI

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, BNN Provinsi Papua Barat telah melaksanakan sejumlah kegiatan pada tahun 2023 melalui program yang ada dengan target output sebesar 298 dan realisasi capaian output sebesar 531. Adapun rincian sebagai berikut :

KODE	RINCIAN	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	%
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	Keluarga	5	100%
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	2	Desa	2	100%
3248.BDD.001	Fasilitasi Program Alternative Development Pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1	Kelompok Masyarakat	1	100%
3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1	Laporan	1	100%
3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	40	Orang	40	100%
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2	Lembaga	2	100%
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	15	Orang	10	67%
3258.BIA.002	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika	2	Produk	2	100%
3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU	5	Orang	5	100%
3259.ADG.001	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	10	Orang	10	100%
3259.ADI.001	Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	25	Orang	25	100%
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	30	Orang	30	100%
3260.BAA.004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkoba (SKHPN)	100	Orang	337	337%
3260.BAA.005	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A	1	Orang	1	100%
3260.BAA.006	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-B	1	Orang	1	100%

KODE	RINCIAN	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	%
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	Lembaga	2	100%
3260.BDB.003	Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota	1	Lembaga	1	100%
3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2	Unit	2	100%
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5	Berkas Perkara	5	100%
5936.QDB.001	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	1	Lembaga	1	100%
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100%
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	1	100%
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	1	100%
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	100%
3239.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1	100%
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100%
3239.EBB.951	Layanan Sarana Internal	17	Unit	18	106%
3239.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	1	100%
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	1	100%
TOTAL		298		531	178%

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNNP Papua Barat untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan analisis dalam menghadapi permasalahan- permasalahan satu tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikapitalisasi oleh BNNP Papua Barat yakni:

1. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama pemerintah daerah maupun stakeholder di Provinsi Papua Barat dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;

2. Adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, swasta dan lembaga masyarakat lainnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika;
3. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat mainstreaming melalui pelibatan banyak instansi baik instansi pemerintah dan pendidikan dan swasta.

Mengenai permasalahan yang akan dihadapi BNNP Papua Barat berkaca pada kondisi umum yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Problematika pengawasan peredaran
 - a. Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
 - b. Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba karena faktor geografis Provinsi Papua Barat yang begitu sulit dijangkau antar kabupaten/kota menjadi salah satu kendala yang sulit dipecahkan, mengingat keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil yang di setiap kabupaten dijadikan sebagai tempat transit oleh para bandar narkoba di wilayah Provinsi Papua Barat.
 - c. Adanya pelanggaran oleh oknum aparat penegak hukum.
 - d. Adanya tambang ilegal yang menjadi tempat peredaran Narkotika.
2. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah
 - a. Belum adanya regulasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
 - c. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
 - d. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
 - e. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi.
 - a. Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa dukungan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas yang masih kurang sehingga membuat capaian target kinerja fasilitas rehabilitasi masih dibawah target.
 - b. Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari rencana strategis BNN RI Tahun 2020-2024, sehingga arah kebijakan, strategi dan fokus program kerja BNNP Papua Barat juga harus selaras dengan rencana strategis BNN RI Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis BNN 2020-2024 dirumuskan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Titik Masuk Jalur Peredaran dan Kapasitas Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika. Strateginya melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan serta peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika. Strateginya melalui peningkatan kerjasama instansional dalam negeri dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
3. Peningkatan Pemberdayaan, Partisipasi dan Kedayatanggapan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Strateginya melalui reformasi manajemen diseminasi dan advokasi publik untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika; dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
4. Penguatan Dukungan Fasilitasi yang mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan. Strateginya melalui Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
5. Penguatan Kerjasama, Inovasi dan Teknologi. Strateginya melalui pengembangan jaringan arsitektur kinerja; dan penguatan penelitian di bidang P4GN.

6. Penataan dan Penguatan Kelembagaan BNN (Tata Kelola Untuk Pelayanan Publik). Strateginya melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN yang didukung dengan kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam Rencana Kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 terdapat 24 target capaian output baik yang menjadi output dari Proyek Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maupun output dari Proyek Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika. Informasi output proyek prioritas BNNP Papua Barat tahun 2024 sebagaimana tersaji pada lampiran.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Provinsi Papua Barat. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota	Rp 183,000,000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota	Rp 116,000,000
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	Rp 264,024,000
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp 15,090,000
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	Rp 272,577,000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit	
6	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNP	3.82 Indeks	Rp 36,442,000
		Meningktanya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68%	
7	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1 Laporan	Rp 75,000,000
8	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara	Rp 525,912,000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
9	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	Rp 120,276,000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
10	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	87 Indeks	Rp 5,031,000
11	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97.66 Indeks	Rp1,390,482,000
12	Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	Rp 31,750,000
13	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	Rp2,534,698,000
14	Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	Rp 20,000,000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi Papua Barat dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Papua Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
MATRIK RENCANA VOLUME RINCIAN OUTPUT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	2 Lembaga
2	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan Yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Layanan Rehabilitasi di Klinik BNNP	30 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	547 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		2. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	2 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Unit
6	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika 2. Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	35 Orang
7	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Laporan
8	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	5 Berkas Perkara
9	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	1. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan 2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan Assesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	8 Orang
			Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika (Unit Vertikal)	2 Produk
			Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)	5 Orang
11		Nilai Kinerja Anggaran BNNP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan
13	Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	Nilai zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan
14	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Nilai zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	Layanan BMN	1 Layanan
			Layanan Umum	1 Layanan
			Layanan Perkantoran	12 Layanan
15	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Nilai zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI PAPUA BARAT



ANAK AGUNG MADE SUDANA, S.H., S.I.K., M.H.